

Optimalisasi Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Budaya Literasi SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta

Kurnia Diah Ratri ^{a,1}, Suyato ^{b,2}

¹ (kurniadiah.2018@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PPKn, FISIP, UNY

² (suyato@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui peranan guru Pendidikan Pancasila dalam gerakan literasi siswa SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta; 2) Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh guru Pendidikan Pancasila dalam gerakan literasi siswa SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta; 3) Untuk mengetahui upaya guru Pendidikan Pancasila dalam gerakan literasi siswa SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil awal menunjukkan bahwa guru PPKn berperan bukan hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak budaya baca di lingkungan sekolah. Upaya yang dilakukan meliputi pembelajaran berbasis proyek, integrasi teks-teks kewarganegaraan, serta pemberdayaan kegiatan literasi sebelum dan sesudah pembelajaran. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik pedagogi literatif dan penajaman fungsi guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan karakter dan demokrasi.

ABSTRACT

This study aims to: 1) To determine the role of Pancasila Education teachers in the literacy movement of students at SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta; 2) To identify the obstacles and challenges faced by Pancasila Education teachers in the literacy movement of students at SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta; 3) To determine the efforts of Pancasila Education teachers in the literacy movement of students at SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. The background of this study is based on the importance of literacy as one of the competencies that students must have. This article aims to explore in depth how PPKn teachers carry out their role in the literacy movement at SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Initial results show that PPKn teachers play a role not only as teachers, but as facilitators, motivators, and drivers of reading culture in the school environment. Efforts made include project-based learning, integration of civics texts, and empowerment of literacy activities before and after learning. This article is expected to contribute to the development of literate pedagogical practices and the sharpening of teachers' functions as agents of change in character education and democracy.

Sejarah Artikel

Diterima: 25-07-2025

Disetujui: 28-07-2025

Kata kunci:

Gerakan Literasi, Pendidikan Pancasila, Peranan Guru

Keywords:

Literacy Movement, Pancasila Education, Role of Teacher

Pendahuluan

Literasi telah mengalami perluasan makna dari yang awalnya hanya sekedar keterampilan membaca dan menulis menjadi kompetensi berfikir kritis, bernalar, dan mengevaluasi secara cermat (Abidin, dkk. 2017). Dalam konteks pendidikan di Indonesia, upaya untuk meningkatkan literasi peserta didik telah dituangkan dalam berbagai kebijakan nasional, salah satunya adalah Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016. Gerakan literasi sekolah merupakan salah satu kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah. GLS diharapkan menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang tidak hanya dijalankan secara insidental tetapi terinternalisasikan dalam setiap aktivitas pendidikan.

Menurut laporan Global education Monitoring Report oleh UNESCO (2023) literasi abad ke-21 mencakup tiga kategori utama: foundational literacy (kemampuan dasar membaca, menulis, menghitung), digital literacy (kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara etis), dan civic literacy (kemampuan memahami isu-isu publik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan mengambil keputusan sebagai warga Negara). Seorang tokoh penting dalam pedagogis kritis, menyatakan bahwa literasi sejati tidak hanya berarti “membaca kata” tetapi juga “membaca dunia”. Dapat diartikan bahwa seseorang tidak cukup hanya memahami informasi secara permukaan, tetapi juga mampu menelaah makna, kepentingan, dan implikasi sosial-politik dari teks atau wacana yang disampaikan. Hal ini selaras dengan kebutuhan pendidikan masa kini yang menekankan pada pembentukan peserta didik sebagai warga negara kritis dan aktif (Freire, 1970).

Fenomena global seperti disinformasi, ujaran kebencian, populisme digital, dan konflik identitas membuat literasi kritis menjadi lebih mendesak dari pada sebelumnya. Laporan OECD (2020) melalui PISA menunjukkan bahwa meskipun kemampuan membaca peserta didik di negara-negara maju meningkat, banyak peserta didik yang tidak mampu membedakan fakta dan opini dalam informasi daring. Ini menandakan bahwa kemampuan literasi teknis tidak cukup tanpa didukung kemampuan berpikir kritis dan reflektif.

Dalam konteks Indonesia, tantangan serupa juga terjadi. Meskipun berbagai program nasional seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah digulirkan sejak 2015 kualitas dan persebaran praktik literasi masih sangat beragam antar wilayah dan antar sekolah. Data dari program For International Student Assessment (PISA, 2018) menunjukkan bahwa literasi membaca peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Pendidikan sebagai sarana sosial tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang cakap secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran dan kecakapan literasi sebagai bagian dari kompetensi esensial warga Negara. Dalam konteks inilah literasi tidak lagi dipandang sebagai keterampilan membaca dan menulis yang bersifat teknis semata, tetapi telah berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis, memahami informasi secara mendalam, serta menggunakannya secara produktif dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi bukan hanya prasyarat akademik, tetapi juga elemen atau kunci dalam membangun warga Negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Zamroni, 2016). Dalam hal ini, Pendidikan Pancasila (PKN) memiliki posisi strategis. Materi-materi seperti hak dan kewajiban warga Negara, partisipasi politik, keadilan sosial, serta nilai-nilai Pancasila secara inheren membutuhkan kemampuan berpikir refleksi dan kritis yang hanya dapat dibangun melalui praktik literasi yang konsisten dan bermakna.

Secara keseluruhan penguatan peranan guru dalam mengembangkan literasi kritis merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan saat ini. Perubahan global, tantangan informasi digital, serta kebutuhan akan warga Negara yang aktif dan berpikir reflektif menempatkan guru terutama guru Pendidikan Pancasila pada posisi sentral. Oleh karena itu sinergi antara peningkatan kompetensi guru, dukungan kelembagaan, dan inovasi pembelajaran menjadi kunci dalam membangun sekolah yang literarif dan progresif.

Namun kenyataannya, pelaksanaan pembelajaran PKN di banyak sekolah masih cenderung normalif dan hafalan. Guru lebih fokus pada penyampaian materi kognitif dan melupakan aspek afektif serta penguatan keterampilan literasi peserta didik. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Ambar (2018) bahwa Gerakan Literasi Sekolah masih belum terimplementasikan secara maksimal karena minimnya integrasi dengan mata pelajaran.

Di sinilah letak urgensi dari penelitian ini yaitu menggali sejauh mana guru PKn dapat melaksanakan perannya dalam melaksanakan gerakan literasi kritis di sekolah menengah. Peran tersebut mencakup kemampuan guru dalam mengintegrasikan teks dan bacaan kontekstual ke dalam proses pembelajaran, membimbing peserta didik berdiskusi dan berpikir kritis, serta membangun ruang-ruang ekspresi literatif yang mendorong partisipasi aktif peserta didik.

Sebagai salah satu sekolah unggulan SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta, gerakan literasi sebenarnya telah diupayakan melalui berbagai program sekolah. Namun, keterlibatan guru PKn sebagai agen pembudaya literasi masih menjadi pertanyaan penting. Apakah guru hanya menjalankan fungsi administratif dalam GLS? Ataupun mereka benar-benar menjadi penggerak budaya literasi di ruang kelas dan luar kelas?

Seorang guru memiliki fungsi strategis dalam membangun ekosistem pembelajaran yang literatif. Menurut UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila guru tidak menjadikan literasi sebagai bagian integral dan proses belajar.

Guru PKn jika diberdayakan secara optimal memiliki potensi besar dalam mengembangkan literasi kritis pesertadidik. Mereka dapat menghadirkan isu-isu actual seperti korupsi, intoleransi, pelanggaran HAM, konflik, dan isu-isu sosial lainnya ke dalam pembelajaran. Melalui pendekatan berbasis literasi guru dapat mengajak peserta didik membaca teks berita, analisis politik, dan dokumen hukum lalu mendiskusikan makna, dampak, lalu menuliskan pandangan pribadi mereka kedalam bentuk esai ataupun opini.

Selain itu guru juga bisa menghubungkan teks dan bacaan dengan pengalaman hidup peserta didik. Sebagai salah satu contoh isu bullying di sekolah dapat diangkat pembahasan tentang perlindungan hak asasi manusia. Melalui literasi kritis peserta didik tidak hanya memahami norma hukum atau moral secara abstrak akan tetapi diharapkan peserta didik mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Namun keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada inisiatif dan kompetensi guru. Guru dituntut untuk memiliki literasi informasi yang baik, mampu memiliki dan mengadaptasi bahan ajar yang relevan, serta menciptakan ruang belajar yang terbuka terhadap perbedaan pendapat dan pemikiran alternatif.

Pentingnya literasi dalam pembelajaran PKn juga diperkuat oleh Soerjono Soekanto (2007) yang mengatakan bahwa peran dalam masyarakat adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks pendidikan, guru tidak hanya memiliki status formal, tetapi juga diharapkan memainkan peran aktif sebagai agen transformasi pengetahuan dan karakter.

Dengan demikian, pembahasan tentang peranan guru PKn dalam konteks gerakan literasi tidak hanya penting, tetapi juga mendesak untuk dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut bagaimana guru PKn dapat menjalankan fungsinya dalam menumbuhkan budaya literasi yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga kritis, reflektif, dan kontekstual. Serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran, upaya dan tantangan maupun kendala yang dihadapi guru dalam gerakan literasi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) tidak hanya bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai demokratis. Dalam praktiknya, pembelajaran PKn yang berbasis literasi dapat meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik terhadap isu-isu kebangsaan serta menumbuhkan sikap kritis dan reflektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Dewi Utami (2016) yang menyatakan bahwa literasi merupakan kemampuan memahami,

menafsirkan, dan menggunakan informasi untuk membentuk pemikiran yang produktif dan konstruktif terhadap lingkungan sosial.

Dalam konteks ini, guru PKn diharapkan memainkan peran lebih dari sekedar menyampaikan materi. Guru diuntut untuk menjadi fasilitator literasi yang aktif, mengintegrasikan pendekatan literatif dalam proses pembelajaran, dan menciptakan suasana kelas yang mendorong kebiasaan membaca, menulis, dan berdiskusi. Peran strategis ini, jika dilaksanakan dengan baik, diyakini mampu mendukung gerakan literasi sekolah secara lebih signifikan.

SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta merupakan salah satu sekolah unggulan di Indonesia yang telah lama dikenal sebagai sekolah model dalam berbagai aspek pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Dengan prestasi siswa yang tinggi dan sumber daya yang memadai, sekolah ini menjadi rujukan dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Namun, status sebagai sekolah favorit tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh dimensi pendidikan berjalan secara ideal, terutama dalam aspek pembelajaran berbasis literasi kritis. Sekolah unggulan seperti SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta cenderung memiliki budaya akademik yang sangat kompetitif, dengan fokus yang tinggi pada pencapaian nilai ujian dan kelulusan ke perguruan tinggi ternama. Kondisi ini, meskipun positif dari segi kognitif, dapat berisiko mengesampingkan pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan partisipatif komponen utama dari literasi kritis. Penelitian oleh Azizah (2022) dan Fitriyani (2021) menunjukkan bahwa banyak sekolah favorit justru terjebak pada pembelajaran yang bersifat normatif dan berorientasi hafalan, sehingga ruang bagi siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis menjadi terbatas.

Pemilihan SMA N 1 Teladan sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa sekolah ini memiliki kondisi ideal dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, dan budaya belajar. Oleh karena itu, jika dalam konteks sekolah seperti ini masih ditemukan tantangan dalam penguatan literasi kritis, maka hal tersebut dapat menjadi representasi dari fenomena yang lebih luas di sekolah-sekolah lain di Indonesia. Selain itu, penelitian ini ingin membuktikan bahwa literasi kritis tidak otomatis berkembang hanya karena sekolah memiliki siswa yang cerdas secara akademik tetapi diperlukan peran aktif guru, kurikulum, serta kebijakan sekolah yang secara sadar mengarahkan pembelajaran ke arah penguatan daya nalar kritis.

Urgensi lain dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana guru Pendidikan Pancasila memfasilitasi pengembangan literasi kritis di tengah kurikulum yang sarat dengan muatan normatif. Mata pelajaran PKn seharusnya menjadi wahana utama dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan melakukan penelitian di SMA N 1 Teladan, penulis dapat mengevaluasi sejauh mana guru PKn mampu mengintegrasikan literasi kritis dalam praktik mengajar mereka, serta menemukan bentuk-bentuk inovasi maupun kendala yang dialami dalam konteks sekolah unggulan. Akhirnya, penelitian ini juga menjadi penting dalam rangka merumuskan strategi yang dapat diterapkan secara luas dalam mengembangkan literasi kritis, tidak hanya di sekolah-sekolah biasa, tetapi juga di sekolah unggulan. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para guru, kepala sekolah, pengambil kebijakan, dan lembaga pelatihan guru dalam menyusun pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas berpikir reflektif, tanggung jawab sosial, dan literasi kebangsaan peserta didik.

Dengan demikian pada SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta dapat diasumsikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara peranan guru PKn dengan peningkatan budaya literasi peserta didik. Guru yang menerapkan strategi pembelajaran berbasis literasi cenderung mampu membangun lingkungan belajar yang mendukung kebiasaan membaca dan berpikir kritis.

Fakta ini menjadikan SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta sebagai lokasi penelitian yang sangat menarik. Pertama, karena sekolah memiliki semua prasyarat yang dibutuhkan untuk menjalankan literasi kritis diantaranya sumber daya manusia, fasilitas, dan budaya akademik yang kuat. Jika dalam konteks sekolah unggulan pun literasi kritis belum berkembang optimal, maka hal ini menunjukkan bahwa permasalahan literasi kritis bukan hanya terkait dengan ketersediaan sarana, tetapi juga berkaitan erat dengan strategi pedagogis dan peran guru.

Kedua, karena SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta merupakan sekolah rujukan nasional, maka hasil penelitian ini berproses memberika kontribusi yang luas. Upaya guru dalam gerakan literasi kritis yang dilaksanakan di sekolah ini dapat menjadi model bagi sekolah lain yang ingin meningkatkan mutu pembelajaran kewarganegaraan yang reflektif dan partisipatif.

Ketiga, karena SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta memiliki peserta didik dengan latar belakang sosial budaya yang beragam, sehingga memungkinkan pengembangan literasi kritis yang inklusif dan demokratis. Lingkungan ini menjadi laboratorium sosial yang tepat untuk mengamati bagaimana peserta didik membangun argumentasi, berdialog, dan merefleksikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian pemilihan SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta sebagai lokasi penelitian bukan semata-mata karena stratusnya sebagai sekolah favorit, melainkan karena sekolah ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan aktual dalam kegiatan gerakan literasi kritis di satuan pendidikan menengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana peranan guru Pendidikan Pancasila dapat menghidupkan kembali dan mampu mendorong terciptanya budaya literasi kritis yang berkelanjutan di sekolah, serta menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan kebijakan literasi pendidikan nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, yaitu Peranan Guru Pendidikan Pancasila dalam Mengembangkan Gerakan Literasi Peserta Didik SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Dalam metode kualitatif data diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, atau analisis dokumen, dan dianalisis secara deskriptif untuk memahami makna dan konteks dari fenomena yang diamati. Metode ini cocok digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang peranan guru Pendidikan Pancasila dalam konteks gerakan literasi siswa SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta.

Menurut Narbuko dan Achmadi (2013) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian ingin memahami secara rinci peran guru PKN dalam mengembangkan gerakan literasi siswa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna dan konteks di balik peran guru tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Sekolah ini dipilih karena merupakan salah satu sekolah menengah atas unggulan yang telah menerapkan program Gerakan Literasi Sekolah secara struktural, namun tetap menghadapi tantangan dalam implementasinya di berbagai mata pelajaran termasuk PKN. Subjek penelitian ini adalah Guru Pkn, Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, dan peserta didik kelas X dan XI. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua bulan yakni pada bulan Mei 2024 hingga Juni 2024. Selama rentan waktu tersebut peneliti melaksanakan serangkaian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin

validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara guru, wakil kepala, dan peserta didik. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Aktif Guru PKn dalam Melaksanakan Gerakan Literasi di Kelas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peranan penting dalam menyukseskan Gerakan Literasi Sekolah (GLS), khususnya dalam konteks literasi kritis. Di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta, peran guru PKn tidak hanya terbatas pada penyampaian materi kurikulum, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam wawancara dan observasi yang dilakukan, tampak bahwa guru berupaya mengintegrasikan nilai-nilai literasi dalam kegiatan pembelajaran melalui berbagai pendekatan, baik melalui diskusi kelas, pemanfaatan isu-isu aktual, hingga penggunaan media digital sebagai bahan reflektif.

Guru PKn mendorong siswa untuk menganalisis kasus-kasus sosial, politik, dan budaya yang sedang berkembang. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya mengajarkan norma dan aturan, tetapi juga membimbing siswa agar mampu mempertanyakan kebijakan publik, memahami konteks sosial suatu peristiwa, dan memberikan tanggapan kritis terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, dalam topik tentang demokrasi, siswa diajak membahas isu-isu seperti netralitas pemilu, ujaran kebencian di media sosial, serta pengaruh politik identitas. Guru berperan memandu diskusi agar peserta didik tidak hanya mengemukakan pendapat, tetapi juga mampu menyusun argument berbasis data dan nilai kebangsaan.

Selain itu, guru juga menjadi teladan dalam membangun budaya literasi. Mereka menunjukkan kebiasaan membaca buku nonteks, memanfaatkan berita aktual sebagai sumber belajar, dan membagikan bahan bacaan yang mendorong siswa untuk berpikir. Salah satu guru menyatakan: "Saya sengaja membawa artikel dari koran harian ke kelas untuk dibaca bersama, lalu kami bahas isinya dari berbagai sudut pandang." Praktik ini menunjukkan bahwa literasi kritis tidak hanya dipraktikkan melalui membaca, tetapi juga melalui proses berpikir bersama dan refleksi.

Gerakan literasi sekolah merupakan program strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menumbuhkan budaya literasi di lingkungan pendidikan formal. Program ini menekankan pentingnya kegiatan membaca, berpikir kritis, dan menulis sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sebagai mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter dan kesadaran kewarganegaraan, PKn memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan praktik literasi, terutama dalam bentuk literasi kritis, ke dalam kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta menunjukkan bahwa guru PKn memiliki beberapa peranan penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan GLS baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu peranan utama guru PKn dalam gerakan literasi adalah sebagai fasilitator. Dalam konteks ini guru tidak hanya menyampaikan materi ajar tetapi juga menyediakan bahan-bahan bacaan yang relevan dengan topik pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami, menganalisis, serta mendiskusikan secara kritis. Guru PKn harus memilih teks yang sesuai seperti artikel opini, berita aktual, kutipan konstitusi, atau tulisan refleksi mengenai isu-isu sosial dan politik. Melalui teks tersebut guru mengajak peserta didik untuk mengembangkan kemampuan memahami wacana yang kompleks, mengidentifikasi argumen, serta menyampaikan pandangan pribadi mereka. Dengan kata lain guru berperan memperluas pandangan peserta didik melalui sumber literatif yang kontekstual dan bermakna. Bisa juga dengan membahas topik

hak asasi manusia atau konflik sosial, guru tidak hanya menjelaskan materi berdasarkan buku ajar, tetapi juga menyajikan potongan berita aktual lalu meminta peserta didik untuk mendiskusikan kasus tersebut dari sudut pandang hukum, etika, dan kemanusiaan. Praktik ini memperkuat kemampuan literasi krisis peserta didik sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

Guru PKn memainkan peran sebagai penggerak diskusi, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber bahwa guru secara rutin mengadakan kegiatan diskusi kelas berbasis teks, di mana peserta didik diminta untuk membaca teks terlebih dahulu, kemudian membahasnya secara berkelompok. Diskusi ini tidak hanya mengasah kemampuan berbicara peserta didik akan tetapi diskusi seperti ini dapat mendorong peserta didik untuk mengkaji ulang pemahaman mereka terhadap isu sosial tertentu. Sebagai salah satu contoh ketika sedang membahas materi tentang hak asasi manusia, guru mengajak peserta didik untuk membaca dan memahami berita yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Peserta didik diajak untuk menanggapi berita tersebut dari sudut pandang hukum, etika, dan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan ini peserta didik diharapkan mampu berfikir logis, mempertimbangkan berbagai perspektif dan membangun sikap peka terhadap berbagai situasi yang ada.

Peranan penting lainnya adalah guru dapat berperan sebagai perancang pembelajaran. Guru PKn menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat unsur literasi sebagai bagian dari tujuan pembelajaran. Misalnya pada RPP tentang sistem pemerintahan, guru menyisipkan aktivitas membaca artikel politik, dan menulis opini terkait peran warga negara dalam kegiatan demokrasi. Termasuk dalam pengembangan media pembelajaran guru juga melakukannya. Guru memanfaatkan sumber digital, video pembelajaran, dan artikel opini sebagai bahan diskusi kelas. Guru juga merancang lembar kerja yang menuntut peserta didik untuk mencari sumber informasi sendiri dan mengelolanya menjadi analisis kritis.

Guru PKn melakukan perannya sebagai role model bagi peserta didik seperti mencontohkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Guru membagikan beberapa bahan bacaan yang sedang dibaca serta memberikan rekomendasi bahan-bahan bacaan yang relevan. Dalam kegiatan ini peranan guru tidak hanya diukur dari pencapaian akademis peserta didik saja akan tetapi diharapkan mampu membentuk pola pikir kritis, sikap reflektif, dan partisipatif peserta didik sebagai warga negara yang baik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan literasi kritis di sekolah sangat bergantung pada kesadaran, inisiatif, dan kapasitas guru. Di tengah tantangan sistemik yang dihadapi dunia pendidikan, guru tetap menjadi aktor kunci yang menentukan arah perkembangan literasi siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan dan pelatihan berkelanjutan agar guru dapat menjalankan peran mereka secara lebih efektif dan bermakna.

2. Upaya Guru PKn dalam Gerakan Literasi

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah salah satu kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan menanamkan budaya membaca, berpikir kritis, dan menulis reflektif dalam kehidupan sekolah. Literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis membaca atau menulis tetapi sebagai sarana untuk mengembangkan daya nalar, atau kecakapan peserta didik dalam menyerap informasi yang diperoleh, dan diharapkan dapat membangun kesadaran sosial dalam kehidupan demokratis (Kemendikbud, 2016). Dalam implementasinya keberhasilan program gerakan literasi sekolah sangat bergantung pada inisiatif dan kreativitas para guru, termasuk guru PKn, yang memiliki tugas atau tanggung jawab mendidik dan membimbing peserta didik menjadi warga negara yang peka, kritis, dan bertanggung jawab.

Upaya guru dalam mendukung dan menjalankan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta terlihat dalam berbagai dimensi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi pembelajaran. Guru tidak hanya menjalankan instruksi program secara administratif, tetapi juga menunjukkan inisiatif dan kreativitas dalam menyesuaikan kegiatan literasi dengan karakteristik siswa serta konteks sosial yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa upaya guru bersifat dinamis dan terus berkembang.

Salah satu hal yang utama dilakukan oleh guru yaitu adanya komitmen guru PKn dalam menyisipkan kegiatan literasi ke dalam RPP. Guru tidak memandang literasi sebagai kegiatan terpisah, melainkan sebagai bagian dari suatu proses pembelajaran. Dalam RPP guru menuliskan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan membaca dan menulis peserta didik. Salah satu contoh dalam pembelajaran tentang demokrasi Pancasila, guru merancang kegiatan membaca artikel tentang pemilu, menganalisis sistem kepartaian, dan menulis opini tentang praktik demokrasi di Indonesia.

Guru Pkn memulai sebagian besar pertemuan dengan kegiatan membaca. Kegiatan ini tidak hanya sebatas membaca pasif, melainkan disertai dengan pertanyaan pematik seperti "Apakah makna pasal ini bagi kehidupan warga negara?" atau "Bagaimana anda menilai tindakan tokoh dalam artikel ini dari pespektif HAM?". Kegiatan membaca di awal pelajaran ini terbukti efektif dalam menstimulasi minat belajar peserta didik sekaligus menjadi jembatan untuk masuk ke materi utama. Selain itu, strategi ini membantu peserta didik memahami keterkaitan antara konsep-konsep normatif dalam PKn dengan realitas kehidupan sosial-politik yang mereka alami.

Guru PKn juga aktif mengembangkan budaya diskusi di kelas, terutama dengan pendekatan diskusi berbasis teks. Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca terlebih dahulu lalu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Guru bertindak sebagai fasilitator yang bertindak mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan argumen, serta merespon secara kritis. Dalam hal ini peserta didik dilatih untuk dapat menghargai satu sama lain apa bila ada pendapat atau argumen yang berbeda satu sama lain. Salah satu contoh praktik ini adalah saat membahas materi tentang hukum dan keadilan. Guru memberikan bahan bacaan yang berkaitan mengenai kasus hukum yang kontroversial, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi lalu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Inovasi pembelajaran seperti Project-based learning dan problem-based learning digunakan untuk mendorong peserta didik lebih aktif membaca, meneliti, dan menyampaikan pandangannya. Melalui pendekatan tersebut, literasi bukan hanya menjadi tujuan tetapi bagian dari proses belajar yang menyeluruh.

Dalam hal ini guru juga memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengakses materi dari berbagai sumber. Bahkan peserta didik diberi ruang untuk membuka gadget yang mereka punya untuk membuka internet. Hal ini dilaksanakan agar peserta didik tidak hanya terpaku dengan teks yang diberikan oleh guru tetapi juga bisa memperoleh informasi sebanyak mungkin dari sumber terpercaya tentunya dibawah pengawasan guru.

Selain di dalam kelas, upaya guru dalam literasi juga terlihat dalam kegiatan ko-kurikuler. Beberapa guru terlibat dalam pelatihan klub literasi, mendampingi siswa dalam lomba debat, menulis opini, dan proyek literasi lainnya. Upaya ini menunjukkan bahwa literasi tidak dibatasi oleh ruang kelas, tetapi menjadi bagian dari budaya belajar yang dikembangkan secara holistik. Dalam wawancara, salah satu guru menyampaikan: "Kami ingin siswa tidak hanya bisa membaca, tetapi juga menyampaikan gagasan mereka.

Upaya guru juga mencerminkan adanya komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan penguatan karakter. Dalam konteks mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan literasi dikaitkan dengan pembentukan identitas warga Negara yang berpikir terbuka, peduli sosial, dan

aktif berkontribusi dalam masyarakat. Guru menekankan pentingnya membaca tidak hanya sebagai sarana memperoleh informasi, tetapi juga sebagai jalan untuk membentuk kepribadian dan pandangan hidup yang lebih reflektif dan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya guru dalam Gerakan Literasi Sekolah sangat penting dan berdampak nyata terhadap pembentukan budaya literasi di sekolah. Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, guru tetap berupaya menjalankan peran mereka dengan inovasi dan dedikasi tinggi. Diperlukan dukungan berkelanjutan, baik dari sisi kebijakan maupun praktik di lapangan, agar upaya yang telah dilakukan dapat berkembang menjadi sistem literasi sekolah yang kuat dan berkelanjutan.

3. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi Guru

Meski berbagai upaya literatif telah dilaksanakan, guru tetap menghadapi beberapa kendala dalam proses pembelajaran hal ini disebabkan tingkat kemampuan dan minat dari dalam diri peserta didik itu sendiri berbeda-beda. Mungkin untuk sebagian peserta didik memang sudah memiliki kesadaran terhadap kegiatan literasi tanpa harus selalu diingatkan tetapi masih ada pula peserta didik yang harus dengan pelan-pelan diingatkan terkait dengan literasi. Maka dari itu hal semacam ini sangat diperlukan dukungan baik dari lingkungan sekolah itu sendiri ataupun lingkungan keluarga saat di rumah atau lingkungan bermain. Peserta didik sangat perlu dorongan agar sama-sama semangat dalam kegiatan literasi ini.

Salah satu kendala paling nyata adalah keterbatasan alokasi waktu. Guru sering kali dihadapkan pada jadwal mengajar yang padat, diikuti oleh kewajiban administratif seperti pengisian laporan, pembuatan perangkat ajar, dan kegiatan penilaian. Kondisi ini membuat guru kesulitan menyediakan waktu khusus untuk kegiatan literasi yang mendalam dan reflektif. Minimnya alokasi waktu pembelajaran PKn yang umumnya hanya tersedia selama dua jam pelajaran (90 menit) per minggu. Dalam waktu yang sangat terbatas tersebut guru harus bisa menyesuaikan materi kurikulum yang cukup padat, mulai dari nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, hingga isu-isu globalisasi dan HAM, hal ini tentu saja membuat guru mengalami kesulitan. Terbatasnya alokasi waktu pada saat jam pembelajaran di kelas membuat guru tidak bisa mengawasi ataupun mengkoordinir peserta didik kapan saja dan dimana saja. Ranah guru sebenarnya hanya sebatas saat jam pembelajaran berlangsung diluar itu sudah bukan cakupannya. Maka dari itu diperlukan komitmen peserta didik itu sendiri yang menempatkan literasi sebagai prioritas utama, bukan hanya sekedar pelengkap.

Adaya kesenjangan literasi peserta didik juga menjadi tantangan sendiri. Beberapa peserta didik memiliki kemampuan membaca dan menganalisis yang baik, sementara yang lain masih mengalami kesulitan memahami bacaan yang kompleks. Perbedaan ini menuntut guru untuk menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang pada kenyataannya tidak mudah dilakukan dalam kelas besar dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Rendahnya minat baca atau kesadaran pada peserta didik yang membuat guru harus memastikan dan selalu mengingatkan agar peserta didik sadar akan pentingnya literasi. Karena beberapa peserta didik masih menganggap literasi bukan sebagai kewajiban ataupun kebutuhan. Mereka masih sering merasa keberatan bahkan buku dianggap tidak menarik.

Guru kesulitan menemukan bacaan yang sesuai, baik dari segi konten maupun gaya bahasa. Beberapa peserta didik merasa jenuh dengan bacaan yang terlalu teoritis atau tidak sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari. Guru pun perlu waktu dan usaha ekstra untuk menyeleksi atau menyusun bahan bacaan alternatif yang menarik namun tetap memuat nilai-nilai literasi kritis. Terbatasnya buku bacaan di sekolah juga merupakan salah satu hambatan

untuk kegiatan literasi. Untuk buku bacaan yang sekolah sediakan mungkin sudah banyak tetapi untuk bahan pembaharuan sekolah tidak sewaktu-waktu bisa memberikan berbagai model buku bacaan dalam waktu yang dingkat. Maka dari itu untuk sumber bacaan guru menyarankan peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber seperti internet melalui fasilitas yang sudah mereka punya.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa meskipun guru menyadari pentingnya literasi dan memiliki niat baik dalam mendukung GLS, terdapat kendala sistemik dan struktural yang menghambat optimalisasi peran mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung, seperti pengurangan beban administrasi guru, penyediaan pelatihan literasi kritis yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi internal sekolah untuk menjadikan literasi sebagai bagian integral dari budaya belajar.

Simpulan

Gerakan literasi sekolah (GLS) telah diterapkan secara luas di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta melalui berbagai tahapan, mulai dari pembiasaan membaca, pengembangan literasi berbasis mata pelajaran, hingga integrasi literasi dalam pembelajaran formal. Program ini bertujuan dapat membentuk budaya literasi yang kuat di kalangan peserta didik.

Guru PKn memainkan peranan penting dalam membersamai peserta didik dalam gerakan literasi ini, baik berperan sebagai fasilitator, motivator, maupun sebagai pendidik. Mereka tidak hanya memberikan materi pelajaran, akan tetapi membimbing peserta didik untuk memahami tujuan dari pada materi yang dibaca peserta didik.

Beberapa upaya yang diterapkan oleh guru PKn antara lain pembacaan artikel, aktual membaca diawal pembelajaran, diskusi kelompok mengenai permasalahan kebangsaan, tugas esai yang menganalisis topik sosial, serta menggunakan media digital seperti video dokumenter ataupun berita daring. Pendekatan ini berhasil meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dan kemampuan berfikir kritis mereka.

Namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan literasi seperti rendahnya minat baca peserta didik, keterbatasan waktu, kurangnya ketersediaan bahan bacaan. Meskipun demikian guru tetap berupaya secara kreatif untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa literasi dalam PKn bukan sekedar aktivitas membaca dan menulis, melainkan bagian integral dari pendidikan demokrasi yang bertujuan membentuk warga negara aktif dan kritis. Dengan demikian penguatan literasi kritisi dalam pembelajaran PKn harus terus didorong melalui kebijakan sekolah dan pengembangan profesionalisme guru.

Referensi

- Aini, N. (2021). Implementasi Literasi Kritis dalam Pembelajaran PKn di SMA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*
- Anjani, R. (2019). Peran Guru dalam Meningkatkan Budaya Literasi di Sekolah Menengah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*
- Arifin, M. (2020). Integrasi Nilai Literasi Kritis dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Civic Education Journal*
- Azizah, N. (2022). Praktik Literasi Kritis dalam Pembelajaran Kontekstual. *Jurnal Pendidikan Karakter*
- Diah, L. M. (2018). Strategi Guru dalam Meningkatkan Literasi di SMA Negeri Favorit. *Jurnal Pendidikan*
- Fitriyani, A. (2021). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Literasi Kritis Siswa di SMA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*

- Hamdani, A., & Sari, R. P. (2021). Literasi Kritis dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Tinjauan Konseptual dan Praktik. *Civic Education Journal*
- Hidayat, R. (2017). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMA: Studi Kasus. *Jurnal Kependidikan*
- Huda, M. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Media Literasi Kritis. *Jurnal Wawasan Kebangsaan*
- Istiqomah, D. (2023). Literasi dan Pembelajaran Kritis pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*
- Kusuma, A. (2016). Tesis: Analisis Strategi Guru PKn dalam Menanamkan Nilai Literasi Politik. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, P. (2020). Pengembangan Literasi Kritis Siswa Melalui PKn di SMA Negeri. *Jurnal Pendidikan Sosial*
- Maulida, H. (2021). Tesis: Peran Guru PKn dalam Pelaksanaan Literasi Sekolah. Universitas Negeri Semarang
- Munawaroh, S. (2022). Strategi Pembelajaran Berbasis Literasi Kritis pada Mata Pelajaran PKn. *Jurnal Civic Education*
- Mustofa, A. (2014). Literasi Politik dan Peran Guru Kewarganegaraan. *Jurnal Demokrasi dan Pendidikan*
- Nafisah, Y. (2019). Laporan Penelitian: Evaluasi Program GLS di Sekolah Menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ningsih, R. (2016). Penguatan Literasi Kritis Siswa Melalui Pembelajaran Kontekstual. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurhasanah, E. (2018). Hambatan Guru dalam Implementasi Literasi Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*
- Pramudito, A. (2022). Efektivitas GLS dalam Meningkatkan Daya Pikir Kritis Siswa. *Jurnal Ilmu Sosial*
- Purnamasari, S. (2021). Literasi Kritis dan Kewarganegaraan Aktif. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmawati, D. (2022). Strategi Guru dalam Implementasi Literasi Kritis pada Pembelajaran PKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*
- Ramadhani, S. (2020). Praktik Refleksi Kritis dalam Kegiatan Literasi Sekolah. *Jurnal Pendidikan Literasi*
- Sari, M., & Supriyadi, B. (2023). Gerakan Literasi Sekolah dan Tantangan Implementasi di SMA. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*
- Septiani, T. (2022). Pembelajaran Berbasis Literasi di Sekolah Menengah Atas. Universitas Negeri Malang.
- Simanjuntak, E. (2017). Pengembangan Literasi Kritis dalam Kurikulum PKn. *Jurnal Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*
- Siregar, R. (2016). Efektivitas GLS dalam Pembelajaran PKn di SMA. Universitas Negeri Medan.
- Sugiarti, D. (2015). Integrasi Media Literatif dalam Pembelajaran. *Jurnal Teknologi Pembelajaran*
- Surya, A. (2018). Evaluasi Literasi Kritis Siswa. Pusat Penelitian Pendidikan, Kemdikbud.
- Utami, A. (2020). Strategi Kolaboratif Guru dalam Penguatan Literasi. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*
- Yuliana, R. (2023). Literasi Digital dan Pembelajaran PKn. *Jurnal Pendidikan Digital*
- Daryanto. (2014). *Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyasa, E. (2015). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sani, R. A. (2014). Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Trianto. (2013). Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Uno, H. B. (2016). Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamroni. (2011). Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.